



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAGIYAR
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 257099

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 737 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.107.692

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 694.107.692

III. HUTANG Rp. 52.092.303

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 642.015.389

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.